

**Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562/Akuntansi**

**USULAN PROPOSAL  
PENELITIAN**



**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)  
DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto)**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304 / Ketua  
Siska Yulia Defitri, SE. M.Si / 1023078301 / Anggota**


**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
MARET 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

<b>Judul</b>	<b>: Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kota Sawahlunto)</b>
<b>Peneliti/Pelaksana</b>	
<b>Nama Lengkap</b>	<b>: Witra Maison, SE. M.Si</b>
<b>NIDN</b>	<b>: 1022026304</b>
<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>: Lektor</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Akuntansi</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Ekonomi</b>
<b>Nomor HP</b>	<b>: 081363310206</b>
<b>Alamat surel (e-mail)</b>	<b>: <a href="mailto:witramaison.02@gmail.com">witramaison.02@gmail.com</a></b>
<b>Anggota Tim</b>	
<b>Nama Lengkap</b>	<b>: Siska Yulia Defitri, SE. M.Si</b>
<b>NIDN</b>	<b>: 1023078301</b>
<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>: Universitas Mahaputra Muhammad Yamin</b>
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>: 2019</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>: Mandiri</b>
<b>Biaya Tahun Berjalan</b>	<b>: Rp. 6.500.000,-</b>
<b>Biaya Keseluruhan</b>	<b>: Rp. 6.500.000,-</b>

Solok, 06 Maret 2019

  
1984  
**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**(Juta Surkraini, SE. M.Si)**  
**NIDN. 1017116201**

**Ketua,**  
  
**( Witra Maison, SE. M.Si )**  
**NIDN. 1022026304**

**Menyetujui,**  
**Kepala LP3M UMMY**  
  
**( DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM )**  
**NIDN: 1019017402**

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	1
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
3. METODE PENELITIAN.....	31
4. JADWAL .....	40
5. DAFTAR PUSTAKA .....	41

LAMPIRAN

# **PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto)**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner.

## **I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sangatlah diperlukan informasi-informasi yang menunjang bagi kemajuan dan kepentingan organisasi, baik organisasi sektor privat maupun sektor publik. Organisasi sektor privat contohnya usaha nirlaba seperti PT, CV, dan organisasi yang memiliki bertujuan untuk memperoleh laba, sedangkan sektor publik contohnya Institusi pemerintahan. Pemerintahan bertugas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai salah satu wujud bentuk pentingnya pemerintahan dalam suatu negara. Dan setiap pemerintahan memiliki bidang keuangannya sendiri untuk mengelola keuangannya.

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan diterbitkannya peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor

1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah undang-undang tersebut, dibuat beberapa peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dengan terjadinya reformasi pengelolaan keuangan Negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance, diantaranya pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2005 telah dikeluarkan paket Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara yang meliputi, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-undang ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar di bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan selama ini, negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran kembali pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk menetapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan sesuai dengan lingkungan pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008).

Sejalan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan juga sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sistem keuangan daerah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat di tugas dan Instansi Pemerintah

tersebut (PP No. 60 Tahun 2008).

Perbedaan penerapan sistem informasi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas (Maryana, 2011).

Namun setelah dikeluarkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Karena dalam Laporan Keuangan berbasis akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Daerah pertama kali yang melakukan Laporan Keuangan Berbasis Akrual adalah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Dan Kota Semarang menjadi pelopor pelatihan bendahara dari instansi pemerintah lain yang ada di Indonesia untuk melakukan Laporan Keuangan Berbasis akrual pada tahun 2015.

Fenomena yang terjadi tentang Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tak juga meningkat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP Kota Sawahlunto Tahun 2014 atau sama dengan opini yang diberikan atas LKPP Tahun 2013. Selama tahun 2014 pemerintah sebenarnya telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tahun 2013. Namun pada tahun 2015 Kota

Sawahlunto berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali dan ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah Kota Sawahlunto dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga didapatkan Kota Sawahlunto pada tahun 2016 dan 2017. Hal Ini menjadi bukti bahwa Kota Sawahlunto masih dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya dan mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah baik, dan diharapkan kedepannya bisa ditingkatkan lagi melalui pembenahan dan pembinaan dibeberapa aspek seperti meningkatkan kemampuan

aparatur pemerintah mengenai pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang lebih memadai melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. (<http://www.padang-bpk.go.id> - minggu,13-01-2019-19:37WIB)

Fenomena yang terjadi tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah yaitu SIMDA yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak terutama oleh pemerintah daerah. Karena merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. SIMDA keuangan dirancang oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pusat (BPKP) untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini dianggap penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance. Dan Kota Sawahlunto baru memulai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Tahun 2016 sebagai salah satu sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya peran internal audit. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat memberikan keynote speech pada lokalkarya Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Dengan demikian internal audit dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Dalam penelitian terdahulu Sutaruno (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Hal yang sama juga disampaikan peneliti terdahulu Kuncoro (2017) dalam penelitiannya dimana setiap variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Pada penelitian terdahulu Yuliani (2010) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diturunkan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Syarifudin (2014) dalam penelitiannya tidak semua variabel independennya berpengaruh positif terhadap variabel dependennya.

Di Kota Sawahlunto dalam pelaksanaannya memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan di setiap daerah aplikasi yang digunakan sama tapi dengan nama yang berbeda oleh daerahnya masing-masing. Dan dalam peran internal audit secara sepintas terlihat mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Objek pada penelitian ini adalah salah satu unit pelaksana teknis bidang penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Dinas Pemerintah Kota Sawahlunto. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada OPD di Kota Sawahlunto)"**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Apakah sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perkembangan teori dalam bidang akuntansi keuangan dan pengauditan khususnya mengenai sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Sawahlunto, Serta merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat semasa bangku perkuliahan, dan dapat dijadikan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang akan datang dan mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas / instansi. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas yang jelas.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah adalah Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah dan organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap undang-undang.

### **2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkualitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturann perundang undangan. (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasinya penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Entitas pelaporan harus menerapkan pencatatan neraca basis akrual, mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibebankan dalam waktu lebih dari dua belas bulan. Apabila suatu entitas memiliki aset yang akan dilibatkan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi atas aset. Neraca akan memberikan informasi mengenai aset yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya yang termasuk klasifikasi aset lancar dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang yang termasuk klasifikasi aset tidak lancar.

### **2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2010;56) kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu :

## 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat Waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Suatu laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui sistem pengendalian internal upaya untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih di pacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada 4 poin yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Tanpa 4 poin tersebut sebuah laporan keuangan belum dapat berkualitas yang memiliki nilai tinggi dalam laporan tersebut. Seperti halnya dengan kita yang tidak memahami sebuah laporan, tentunya kita akan merasa bingung.

### **2.1.3 Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah tidak di rancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang di tentukan oleh perundang undangan. PP No.24 tahun 2005 paragraf 14 dikutip oleh Abdul Halim Syam Kusufi (2012;265) terdapat 6 komponen laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## **2.2 Sistem Informasi Manajemen**

### **2.2.1 Pengertian Sistem**

Menurut Sutabri (2012;6) pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Atmosudirdjo (2012;7) mendefinisikan bahwa sistem adalah sebagai berikut. Suatu sistem yang terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen - komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Selanjutnya Menurut Yakub (2012;1) bahwa sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, dapat dinyatakan bahwa sistem adalah sekelompok unsur- unsur yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama agar menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

Dari menurut beberapa para ahli menjelaskan bahwa sistem adalah suatu unsur atau komponen yang terhubung dan memiliki tujuan yang sama. Sistem juga berfungsi dalam menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya. Terutama dalam organisasi atau instansi kita harus memiliki sistem yang tepat dalam

pengambilan keputusan, bahkan dalam di dalam pemerintahan di haruskan memiliki sistem yang baik dalam kinerjanya.

Unsur-unsur dalam sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk memudahkan arus informasi agar tercapai tujuan bersama. Dan di dalam suatu sistem dibutuhkan suatu unsur-unsur yang digunakan sebagai penggerak atau saling berinteraksi satu sama yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah organisasi atau instansi.

### **2.2.2 Pengertian Informasi**

Menurut Yakub (2012;8) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Sutabri (2012;22) informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya Susanto (2012;46) mendefinisikan informasi sebagai hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat yang dapat digunakan.

Dari definisi-definisi para ahli yang dimaksud dengan informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Agar menjadi tolak ukur bagi penggunaanya dalam memanfaatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi juga dapat bersumber dari data yang kita peroleh dalam suatu kegiatan kerja. Bahkan data yang kita peroleh juga dapat mempengaruhi suatu keputusan oleh seorang pimpinan, yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

### **2.2.3 Pengertian Manajemen**

Menurut Nugroho (2010;58) manajemen adalah suatu tim yang disusun oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. Menurut Bangun (2012;38) manajemen adalah rangkaian aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Stoner (2011;60), pengertian manajemen adalah Suatu proses perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi para ahli, penulis berpendapat bahwa manajemen meliputi rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Dalam tujuannya untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi pelaksana aktivitas manajemen itu sendiri. Dimana setiap pelaksana manajemen memiliki standarnya masing-masing dalam pelaksanaannya.

Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian dalam menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya. Dan juga dapat diartikan bahwa manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu.

#### **2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen**

Menurut Mcleod (2010;11) sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Menurut Jogiyanto (2011;14) sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi- informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

Berdasarkan pada beberapa definisi-definisi para ahli dapat diartikan bahwa sistem informasi manajemen adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen yang baik dan berguna bagi mereka yang membutuhkan. Dan sebagai pembanding dalam pengambilan keputusan yang akan datang.

#### **2.2.5 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Sutaruno (2014) menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam



rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Program SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga *output*nya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

#### **2.2.6 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP,2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- 2) Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- 3) Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- 4) Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*. Sebagai sarana untuk

pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan Sistem Aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP,2013) adalah sebagai berikut :

- 1) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
- 2) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin), dan
- 3) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
- 4) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

### **2.2.7 Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2013), yaitu :

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

Dalam pengklasifikasian SIMDA ada tiga tingkatan yang harus kita perhatikan. Pertama Sistem Informasi Eksekutif yang berpedoman pada pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan sebagai pendukung bagi pimpinan. Kedua Sistem Informasi fungsional yang berpedoman pada pendukung informasi strategi pimpinan daerah.

Ketiga Sistem Informasi Operasional yang menunjang pada tugas pokok masing-masing dinas/lembaga dalam tingkatan pemanfaatan Sistem Informasi. Terlebih lagi berguna bagi para petinggi daerah yang memanfaatkan informasi untuk pelaksanaan kinerja para pegawainya. Dan untuk kelangsungan kerja suatu organisasi.

### **2.2.8 Unsur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2013), yaitu sebagai berikut :

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal, pelayanan publik, situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik

tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Unsur dari SIMDA banyak membahas bagaimana suatu kerangka arsitektur memiliki lapisan strukturnya, yang terdiri dari bagaimana akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik. Dan juga bagaimana portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi.

Pada lapisan ketiga organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi. Lapisan keempat infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana yang berbentuk perangkat keras dan lunak yang mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

### **2.2.9 Prosedur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Prosedur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2013 yang mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan

ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya laporan tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan, Investor, Kreditor, dan Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, pemerintah Daerah lain, dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Dan juga pada pencatatan merupakan bagian keuangan yang melakukan pencatatan *double entry* dengan menggunakan *cash basis* atau *accrual basis* selama tahun anggaran. Pada penggolongan dan pengikhtisaran adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan posnya masing-masing. Pelaporan merupakan proses akhir dari suatu kegiatan dalam laporan keuangan.

#### **2.2.10 Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

##### 1. SIMDA Versi 1.0

Aplikasi SIMDA versi 1.0 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draf sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai tahun 2004.

##### 2. SIMDA Versi 2.0

Aplikasi SIMDA versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat dari adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 tahun 2005 mengenai SAP, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai aplikasikan sejak tahun 2004 sampai tahun 2006.

##### 3. SIMDA Versi 2.1

SIMDA Versi 2.1 merupakan sistem informasi versi terbaru yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan

keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri No. 3 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai saat ini masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dalam SIMDA versi pertama merupakan sistem keuangan pertama kali yang dikembangkan oleh BPKP pada tahun 2003. Dan juga mengacu pada pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada SIMDA versi kedua merupakan penyempurna dari versi sebelumnya yang mendasari pada peraturan pemerintah terbaik.

Pada versi ketiga merupakan versi terbaru yang berkembang dari akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. dan juga versi ketiga juga dapat dikembangkan lebih baik lagi, untuk mencapai tuntutan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam laporan keuangan.

### **2.2.11 Output yang Dihasilkan**

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan (BPKP,2013) adalah :

1. Penganggaran
  - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
  - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
  - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM)
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - d. Surat Tanda Setoran (STS)
  - e. Register
  - f. Surat pengendalian lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Jurnal
  - b. Buku Besar
  - c. Buku Pembantu
  - d. Laporan Realisasi Anggaran
  - e. Laporan Arus Kas
  - f. Neraca

Program Aplikasi SIMDA keuangan didukung dengan :

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan
- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan.

Dalam output yang dihasilkan dalam SIMDA yaitu penganggaran meliputi rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan surat penyediaan dana. Dalam penatausahaan lebih banyak tentang surat-surat dan register yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan akuntansi dan pelaporan mengacu pada jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program aplikasi SIMDA juga didukung dengan buku manual sistem dan prosedur penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pedoman pengoperasian aplikasi keuangan. Dan juga dapat berguna bagi pengguna dalam menentukan kualitas suatu laporan yang sesuai dengan peraturan pemakaian sistem aplikasi.

#### **2.2.12 Fungsi Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan (BPKP,2013) adalah:

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan tepat waktu.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh

pengguna laporan.

5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing (EDP)* audit.

Dalam pengimplementasikan aplikasi keuangan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan tepat waktu dalam pelaksanaannya. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya yang dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya.

Dan juga fungsi Penyajian informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang digunakan oleh pengguna laporan secara maksimal dapat mempengaruhi. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi elektronik audit yang dapat mempermudah dalam segala kegiatan kerja.

### **2.2.13 Keunggulan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan (BPKP,2013) adalah :

1. Output atau laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan
2. Berbasis windows
3. Validasi inputan data lebih terjamin
4. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi, dan
6. Memfasilitasi akuntansi penggunaan anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA (BPKP,2013) diantaranya :

#### **a. Sesuai Peraturan**

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

#### **b. Kesenambungan *Maintenance***

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

c. *Transfer of Knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan satu kali untuk selamanya.

d. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

Dalam keunggulan aplikasi SIMDA yang dihasilkan dalam laporan yang disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat juga menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Berbasis windows, dan validasi inputan data lebih terjamin. Karena dapat mempermudah dalam menghasilkan laporan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai undang-undang.

Manfaat lainnya antara lain sesuai peraturan, secara otomatis dilaksanakan dengan pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada peraturan yang ada. Berkesinambungan lokasi juga merupakan salah satu manfaatnya karena mempermudah dalam pemeliharaan sistem. Adanya pembagian pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat pemerintah. Dan juga program aplikasinya telah terintegrasi sesuai peraturan yang ada.

#### **2.2.14 Pembiayaan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

Biaya yang dikenakan terhadap program aplikasi SIMDA (BPKP,2013) ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasinya, biaya



yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasangkan program tersebut. Hal ini yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah biaya dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Itu berarti bahwa setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

Pada pembiayaan penerapan SIMDA keuangan tergantung pada pemakaiannya masing-masing. Karena pembiayaannya dilakukan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain sesuai kebutuhan. Namun biaya-biaya tersebut sesuai dengan pemakaian komputer yang dipakai dalam suatu daerah tergantung pemerintah daerahnya.

Dan pemerintah telah menganggarkan biaya dalam pemakaian aplikasi SIMDA. Ini terlihat dalam rencana anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Itu semua tidak akan terlaksana tanpa campur tangan instansi yang bersangkutan. Pembiayaan yang dilakukan juga untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi yang valid.

## **2.3 Peran Internal Audit**

### **2.3.1 Pengertian Audit Internal**

Pengertian Audit Internal atau Internal Auditing menurut *Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2013;56) *Internal auditing is an independent, objective assurance, and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and governance processes.*

*The Institute of internal auditor* (2010) yang dikutip oleh Yuliani dkk (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan

konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Menurut Mulyadi (2013;16) Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

### **2.3.2 Peran Internal Audit**

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintahan Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Audit Internal merupakan suatu kegiatan untuk menilai secara bebas (independen) atas kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi guna memenuhi kebutuhan pihak manajemen dengan cara memberikan analisis, penilaian, komentar dan rekomendasi untuk kemajuan perusahaan. Menurut tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar

Sektor Publik STAN (2010) yang dikutip oleh (Diani, 2014) tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Yuliani (2010) menggambarkan lingkup audit internal modern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dalam menggambarkan ruang lingkup audit internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda. Dalam informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan merupakan suatu penilaian yang sistematis dan objektif.

Dalam hal tersebut risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi sesuai petunjuk yang ada. Peraturan eksternal serta kebijakan yang ada bisa diterima dan telah diikuti. Kriteria operasi yang memuaskan atau terpenuhi juga merupakan salah satu hal yang baik. Dan tujuan organisasi telah tercapai secara efektif dilakukan dengan tujuan untuk konsultasi.

### **2.3.3 Tujuan Audit Internal**

Sukrisno Agoes (2013;205) berpendapat bahwa pada umumnya, tujuan dilakukannya audit internal dalam suatu perusahaan adalah untuk membantu seluruh anggota organisasi khususnya pihak manajemen dalam menganalisis dan mengawasi tanggung jawab masing-masing anggota, apakah telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, ada beberapa kegiatan yang harus

dilakukan oleh para Internal Auditor perusahaan dalam Sukrisno Agoes (2013; 207), yaitu:

1. Menelaah dan menilai tentang memadai atau tidaknya suatu penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan seriap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dimana para Auditor Internal perusahaan dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal agar tujuan dari diselenggarakannya kegiatan pemeriksaan internal perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam menelaah dan menilai tentang memadai atau tidaknya suatu penerapan sistem pengendalian manajemen secara efektif. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan memastikan seberapa jauh harta perusahaan atau organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas masing-masing.

Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak manajemen. Dan menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas para auditor untuk dapat memberikan kontribusinya.

#### **2.3.4 Jenis-jenis Audit**

Menurut Sukrisno Agoes (2013), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
7. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audite yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Audit juga dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaannya. Menurut Soekrisno Agoes (2013), Ditinjau dari jenis pemeriksaannya audit dibagi menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Management Audit*).

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*),

Suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakanyang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

3. Audit Komputer (*Computer Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem Elektronik Data Processing (EDP).

4. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Dalam jenis-jenis audit dibedakan antara pemeriksaan umum dan khusus. Bedanya kalau yang umum dengan khusus adalah KAP sebagai lembaga yang mengeluarkan opini yang baik sesuai dengan kinerja masing-masing atas dasar laporan keuangan. Sedangkan

husus lebih pada pemeriksaan yang hanya dibatasi pada permintaan audit.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem Informasi Manajemen Daerah disingkat SIMDA adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) tentang pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kota Banda Aceh membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat apabila masing-masing SKPD memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Rahmatia Sutaruno (2014) menemukan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nur Ulfiati (2017) menemukan juga bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adi Kuncoro (2017) juga menemukan bahwa sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Maka keterkaitan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Sistem Informasi Manajemen daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Adanya peran internal audit atau peran inspektorat selaku pengawas intern pemerintah dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, handal, dan tepat waktu. Untuk menghasilkan data yang berkualitas, handal, dan tepat waktu dalam informasi yang dihasilkan oleh OPD, inspektorat melakukan review/pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Proses review/pemeriksaan atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan daerah itu sendiri.

Syarifudin (2014) menemukan bahwa peran auditor internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin efektif peran auditor internal maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suherman, dkk (2017), penelitian yang menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Yuliani dkk (2010) menemukan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena proses review/pemeriksaan atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Maka keterkaitan antara pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut hasil analisis penelitian Roviyantje (2011), ditemukan bahwa setiap dilakukan peningkatan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi kepada aparatur pemerintah, khususnya pada pegawai pengelola keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) tentang pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kota Banda Aceh membuktikan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan Fransisca (2014) menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel sistem informasi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Manado.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka keterkaitan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

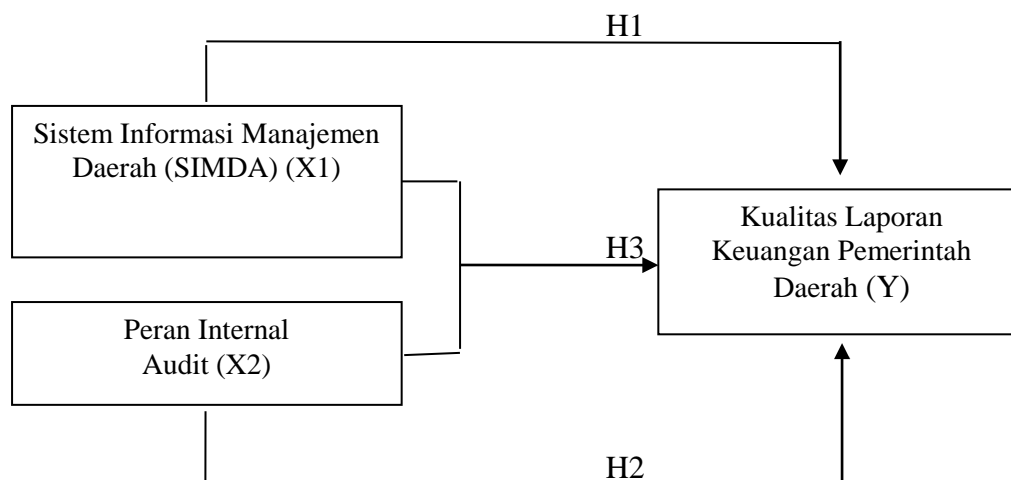
H3: Sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah suatu tinjauan mengenai apa yang diteliti dan dituangkan dalam sebuah bagan yang menjadi alur pemikiran penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dan Peran Internal Audit (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Maka dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat ekplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012;59) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Peran Internal Audit (X2) dan sebagai variabel independen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi menurut Sugiyono (2010;115) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang menerima wewenang delegasi dan tanggung jawab untuk terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan serta orang yang bertugas berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang terdapat pada 27 OPD Kota Sawahlunto.

Sampel menurut Sugiyono (2010;116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Sampling Jenuh. Sugiyono (2011;85) menyatakan bahwa Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel, dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan semua populasi sebagai sampel, dimana ada 27 OPD yang masing-masing OPD terdiri dari 3 kategori yang dijadikan sampel, yaitu Kepala OPD, Kepala Sub Bagian (Kasubag)/Kasi OPD dan Bendahara OPD yang bertugas disetiap OPD se-Kota Sawahlunto.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan seperti agama, jenis kelamin dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner tertulis terdiri dari beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Berdasarkan sumbernya, data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber data, Sugiyono, (2011;137). Data primer tersebut didapatkan dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada Bendahara OPD, Kepala Sub Bagian (Kasubag)/Kasi OPD dan Kepala OPD yang bertugas di setiap OPD se-Kota Sawahlunto.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan seputar topik penelitian yang dibagikan kepada responden yang sudah ditentukan pada masing-masing OPD nya. Pengukuran kuesionernya dengan menggunakan skala likert 5 point yang terdiri dari:

STS ( sangat tidak setuju)	=	1
TS ( tidak setuju)	=	2
N (netral)	=	3
S ( setuju)	=	4
SS ( sangat setuju)	=	5

Skala likert tidak di tentukan oleh berapa point, tapi lebih kepada ketepatan point pada setiap pertanyaan. Alasan pemilihan skala likert 5 point dalam pengukuran kuesioner penelitian ini adalah untuk memudahkan responden dalam mengisi pernyataan yang terdapat pada kuesioner sehingga jawaban nya lebih objektif dan tepat. Oleh karena itu peneliti menggunakan skala likert 5 point untuk melihat kecenderungan pendapat responden kearah setuju atau tidak setuju.

### 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### 3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari Variabel Dependen (terikat) dan Variabel Independen (bebas).

- Variabel Dependen (terikat) Menurut Indriantoro dan Supomo (2014;63), variable dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
- Variabel Independen (bebas) Menurut Indriantoro dan Supomo (2014;63), variabel

independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1) dan Peran Internal Audit (X2).

### 3.5.2 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Indikator, dan Skala Pengukuran**

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)	Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.  <i>Sumber: Sutaruno, 2014</i>	a. Pencatatan b. Penggolongan c. Penafsiran d. Pelaporan  <i>Sumber: PP No.18 Tahun 2013</i>	Likert

2	Peran Internal Audit (X2)	<p>Perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.</p> <p><i>Sumber:</i> <i>PP No.41 Tahun 2007</i></p>	<p>a. Pengawasan. b. Penilaian kinerja c. Review d. Tingkat obyektivitas auditor internal</p> <p><i>Sumber:</i> <i>Yuliani(2010)</i></p>	Likert
3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	<p>Kualitas Laporan Keuangan adalah suatu laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya dan harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas serta berguna dalam pengambilan keputusan.</p> <p><i>Sumber:</i> <i>Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010</i></p>	<p>1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami</p> <p><i>Sumber:</i> <i>Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010</i></p>	Likert

### 3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan desain risetnya menggunakan desain kausal, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel bebas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan uji-uji diantaranya uji asumsi klasik, regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

#### 3.6.1 Uji Kualitas Data

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila dapat menunjukkan hasil ukurnya dengan cermat dan akurat. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, dapat dilihat dengan pengujian validitas instrumen menggunakan software statistik, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Pearson Product Moment*.

Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Product Moment*, koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  dengan cara membandingkan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Jika  $|r_{hitung}| > |r_{tabel}|$  maka data dikatakan valid, dan sebaliknya jika  $|r_{hitung}| < |r_{tabel}|$  maka data dikatakan tidak valid. Apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05, Sugiyono (2012;133). Dalam uji validitas dilakukan perbandingan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Dengan membandingkan  $r_{hitung}$  pada kolom *Pearson Product Moment* dengan  $r_{tabel}$ , dan dengan kontribusi signifikan pada level 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df) = n-k*, dimana  $n$  adalah jumlah responden penelitian.

##### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemantapan atau konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dapat dikatakan mantap bila dalam pengukurannya secara berulang-ulang dapat memberikan hasil yang sama dengan catatan semua kondisi tidak berubah. Untuk uji reliabilitas, semakin dekat koefisien maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel *Cronbach Alpha*. Nilai reabilitas dinyatakan *reliable* jika mempunyai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Untuk menguji

reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden atas pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dinyatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ . Jika *Cronbach Alpha*  $< 0,60$  maka dikatakan tidak reliabel. Dan nilai karakteristik standar sebesar 0,60 sebagai batas penilaian pada *Cronbach Alpha*. Kriteria nilai tingkat keandalan *Cronbach Alpha* dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Klasifikasi Reliabilitas**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Reliabilitas</b>
0,8000 – 1,0000	Sangat tinggi
0,6000 – 0,7999	Tinggi
0,4000 – 0,5999	Cukup
0,2000 – 0,3999	Rendah
0,0000 – 0,1999	Sangat rendah

Sumber : Tedi Rusman (2013;57)

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliabel, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2011;37) pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas penelitian ini menggunakan normal *P-P Plot*. Dasar pengambilan keputusan dalam penggunaan *P-P Plot* yaitu:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2011;37), uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* di atas ( $>$ ) 0,10 dan nilai VIF di bawah ( $<$ ) 10. Jika nilai *tolerance*  $>$  0,10 dan nilai VIF  $<$  10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Jika nilai *tolerance*  $<$  0,10 dan nilai VIF  $>$  10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized, Sujarweni (2014;186).

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*. Regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka nol, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola, Sujarweni (2014;187)

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data-data pengamatan dapat dilihat nilai koefisien signifikannya, dalam hal ini ditetapkan  $\alpha = 0,005$ . Apabila koefisien signifikan lebih besar dari  $\alpha$  (0,005), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghazali (2011;139).

#### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat uji yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda (*multiple regression*). Menurut Sugiyono (2012;192) analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan



prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana

:Y	=	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a	=	Konstanta
b <sub>1</sub> ,b <sub>2</sub>	=	Koefesien Regresi dari Variabel Independen
X <sub>1</sub>	=	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
X <sub>2</sub>	=	Peran Internal Audit
e	=	Error

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji t (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat, Ghazali, (2012;44). Kriteria pengujian dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel sebagai berikut:

- Jika  $| t_{hitung} | > | t_{tabel} |$  dan nilai signifikannya  $< 0,05$  artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika  $| t_{hitung} | < | t_{tabel} |$  dan nilai signifikannya  $> 0,05$  artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas.

## 2. Uji F (F-test)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Menurut Ghozali (2011;98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $|F_{hitung}| > |F_{tabel}|$  dan nilai signifikannya  $< 0,05$  artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara  $X_1$ , dan  $X_2$  secara simultan terhadap  $Y$ .
- b. Jika nilai  $|F_{hitung}| < |F_{tabel}|$  dan nilai signifikannya  $> 0,05$  artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap  $Y$ .

### 3.6.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2011;97) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai  $R^2$  kecil dari satu berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu atau dua variabel bebas kita menggunakan R square, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan adjusted R square yang nilainya selalu lebih kecil dari R square, Ghozali, (2011;97). Dalam penelitian ini pengujian koefisien determinasi menggunakan R square, karena variabel dalam penelitian ini memakai 2 variabel bebas.

## JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penentuan topik penelitian												
2.	Perumusan masalah penelitian												
3.	Penulisan Proposal												
4.	Survey Awal												
5.	Memvalidasi Instrumen												
6.	Collected Data												
7.	Analisis Data												
8.	Pengujian Hipotesis												
9.	Penulisan laporan akhir												

## DAFTAR PUSTAKA

- Botutihe, Tutun Hermawanto. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*.
- Diana, Anastasia. Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Diani, Dian Irma. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman), *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Fransisca, Irene Ponamon: 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintahan Kota Manado.
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR-Study & Accounting Research. Vol XI, No. 1*.
- <http://www.padang-bpk.go.id-minggu,13-01-2019-19:37WIB>
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota), *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. <http://papers.ssrn.com> di akses 10/4/2015.

- Madjham, Anggraeni S dkk. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara), *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Muliani. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Mulyadi. 2011. *Auditing*. Buku Satu, Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Accounting*. Vol 3, No 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah*. Melalui (<http://www.google.com>) 10/4/2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. tentang *Perangkat Daerah*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. tentang *Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan*. Melalui (<http://www.ksap.org>) 29/11/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015

Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Universitas Siliwangi*.

Sari, Diana. 2012. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Indonesian Journal of Economics and Business*.

Sari, Lusi Novita. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business*. Buku 2. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Susilawati dan Dwi Seftihani, 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *STAR- Study & Accounting Research*. Vol.XI, No. 1 – 2014 ISSN: 1693-4482

- Sutaruno, Rahmatia : 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2, No 1.*
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003. tentang *Keuangan Negara*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang *Pemerintahan Daerah*. Melalui (<http://www.kpu.go.id>) 10/4/2015
- Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004. tentang *Perimbangan Keuangan*. Melalui (<http://www.kpu.go.id>) 10/4/2015
- Wati, Kadek Desiana. Nyoman Trisna Herawati. Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2, No 1.*
- Windiastuti, Ruri. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Universitas Widyatama.*
- Yenita, Devi. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD (Study Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang). *Jurnal FE UNP*
- Yensi, Desi Sefri. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Faculty Of Economic Riau University.*
- Yuliani, Safrida. dkk. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Banda Aceh). *Jurnal Accounting. Vol 3, No 2, 206-220.*



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

## Surat Tugas

No.063/ST-P/LP3M-UMMY/III-2019

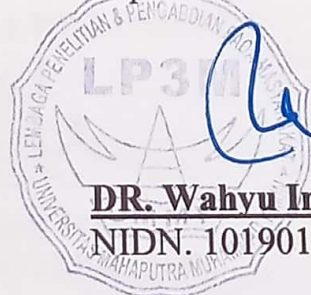
Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si  
NIDN : 1022026304  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk I/ IIIId  
Prodi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Solok

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Sawahlunto)**” pada Tahun Akademik 2018/2019

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 06 Maret 2019  
Kepala LP3M UMMY



**DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.**  
NIDN. 1019017402





**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si  
NIDN : 1022026304  
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ III d  
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto)**, yang dilaksanakan tahun akademik 2018/2019 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 06 Maret 2019



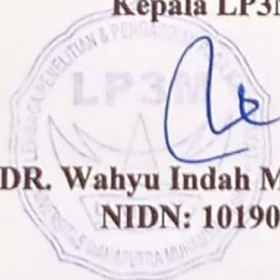
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi

(**Juli Sekrini, SE. M. Si**)  
NIDN. 1017116201

Ketua,

(**Witra Maison SE. M. Si**)  
NIDN. 1022026304

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY



(**DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM**)  
NIDN: 1019017402